

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Efektivitas mengacu pada tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran ataupun tujuan yang telah ditetapkan. Handayani S. (2006) menjelaskan bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas merupakan unsur dalam pencapaian tujuan ataupun sasaran yang telah ditentukan dalam organisasi, kegiatan maupun program. Untuk menilai suatu organisasi efektif atau tidak secara keseluruhan ditentukan oleh tujuan organisasi tercapai dengan baik atau tidak. Menurut Sufiati dkk. (2021) efektivitas adalah tingkat tujuan yang diwujudkan oleh organisasi.

Supriyono ((2018) mengemukakan bahwa hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang dicapai, jika semakin besar kontribusi keluaran yang dihasilkan dari pencapaian sasaran, maka dapat dikatakan efektif. Sebaliknya jika kontribusi keluaran lebih kecil dari pencapaian sasaran, maka dikatakan tidak efektif. Menurut Purwanti (2022), efektivitas didefinisikan sebagai ukuran seberapa baik suatu pekerjaan dilaksanakan, serta sejauh mana individu dapat menghasilkan keluaran yang sesuai dengan harapan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan kata lain, efektivitas mencakup dua aspek penting: kualitas pelaksanaan tugas dan kesesuaian hasil dengan tujuan yang ingin dicapai

Penilaian efektivitas suatu program perlu dilakukan untuk mengetahui dampak dan manfaat yang dihasilkan oleh program tersebut. Suatu program dikatakan efektif apabila usaha atau tindakan yang dilakukan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Efektivitas digunakan sebagai tolak ukur untuk membandingkan antara rencana dan proses yang dilakukan dengan hasil yang dicapai. Menurut Makmur (2011), efektivitas program merupakan kegiatan yang menampakkan ketepatan antara harapan yang diinginkan dengan hasil yang dicapai, dimana ditunjukkan dengan ketepatan harapan, implementasi, serta hasil yang dicapai. Efektivitas program dapat diketahui dengan membandingkan tujuan program dengan output program.

Keberhasilan suatu program mempertimbangkan tidak hanya sasaran organisasi tetapi juga proses dalam mencapai sasarannya. Dalam mengukur efektivitas suatu program juga tidak sederhana, banyak faktor dan kriteria yang ditentukan untuk menilai tingkat efektivitasnya. Menurut Susanto(2023), efektivitas dapat diukur melalui empat indikator utama yaitu indikator input, indikator proses, indikator output, indikator outcome. Keempat indikator ini saling berkaitan dan menjadi dasar untuk menilai sejauh mana suatu sistem atau program berjalan secara efektif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam pemerintahan daerah, efektivitas suatu program merupakan indikator utama dalam menilai sejauh mana tujuan program tersebut dapat tercapai, serta sejauh mana program tersebut dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Dalam konteks pelayanan publik, khususnya administrasi kependudukan, efektivitas program menjadi indikator utama dalam menilai seberapa baik suatu program memberikan manfaat, efisiensi, dan kepuasan kepada masyarakat sebagai penerima layanan.

Administrasi kependudukan memiliki peranan penting dalam pemerintahan dan pembangunan, di mana penegelolaan data kependudukan yang baik akan mendukung perbaikan tata kelola pemerintahan dan pembangunan. Firmansyah & Anisykurlillah (2023), menekankan bahwa pemerintah diharapkan dapat menyediakan program administrasi kependudukan, dengan harapan pelayanan tersebut menjadi lebih cepat, mudah dalam persyaratan, serta pelayanan tanpa pemungutan biaya.

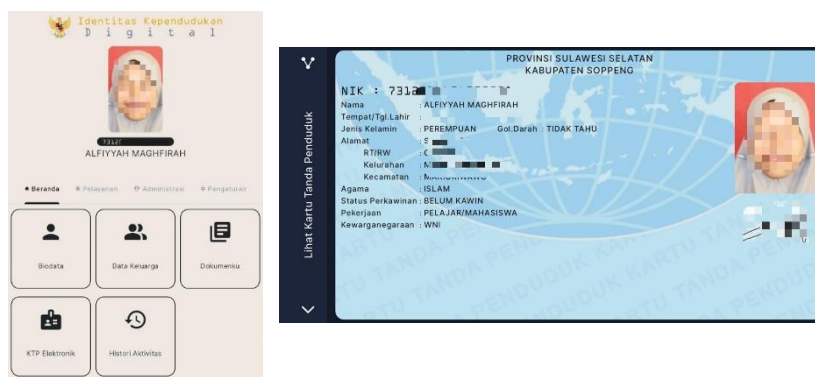
Salah satu program yang dihadirkan oleh pemerintah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu inovasi oleh Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen DUKCAPIL)) yakni Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik berbasis digital atau disebut Identitas Kependudukan Digital (IKD). Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022, Identitas Kependudukan Digital adalah informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan Dokumen Kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan Data Pribadi sebagai identitas yang bersangkutan.

Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) membuka peluang untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi yang lebih tinggi dalam melayani serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan Identitas Kependudukan Digital (IKD), kita tidak hanya memiliki “KTP Digital”, tetapi juga alat yang berperan sebagai *Single Sign On* (SSO) untuk verifikasi identitas secara online. Program Identitas Kependudukan Digital memiliki tujuan untuk memperkuat keamanan dan meminimalkan risiko pemalsuan identitas oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sistem berbasis digital ini memungkinkan adanya pengawasan serta kontrol yang lebih ketat terhadap integritas data dan validitas dokumen.

Dalam Pasal 14 Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 tercantum tujuan penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital, yaitu sebagai Berikut:

1. Mengikuti penerapan TIK terkait digitalisasi kependudukan;
2. Meningkatkan penggunaan digitalisasi kependudukan oleh masyarakat;
3. Mempermudah dan mempercepat transaksi digital dengan layanan publik atau privat;
4. Mengamankan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital melalui sistem.

Gambar 1.1 Tampilan Utama Aplikasi Identitas Kependudukan Digital

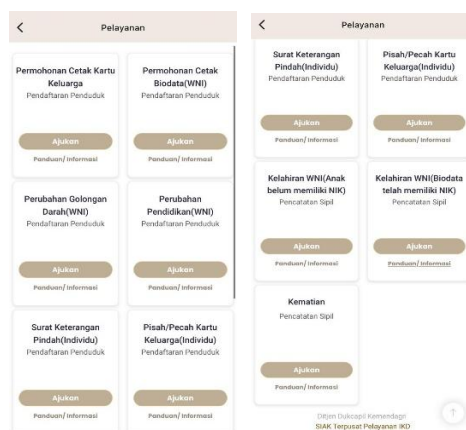


Sumber : Aplikasi Identitas Kependudukan Digital

Identitas Kependudukan Digital dirancang untuk mendigitalisasi data kependudukan bagi masyarakat yang telah memiliki KTP-el. Sesuai dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, peningkatan pelayanan administrasi kependudukan harus dilakukan secara profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif. Aplikasi ini bertujuan untuk menggantikan sebagian fungsi administrasi manual dengan sistem berbasis digital, sehingga mempermudah masyarakat dalam mengakses dokumen kependudukan seperti KTP elektronik (KTP-el), data Keluarga, dan data biodata.

Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat melaporkan perubahan data, kerusakan, atau kehilangan dokumen secara langsung tanpa harus datang ke kantor Dukcapil. Adapun layanan dalam aplikasi IKD, antara lain pengajuan administrasi penduduk seperti surat keterangan pindah dan pemisahan KK, pencatatan sipil untuk pelaporan kelahiran atau kematian, serta perubahan data seperti golongan darah dan pendidikan. Selain itu, aplikasi ini juga mendukung permohonan cetak ulang KK atau biodata WNI, pembaruan data kependudukan, dan menyimpan riwayat aktivitas administrasi yang diajukan melalui aplikasi. IKD juga menyediakan versi digital KTP-el yang dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan administrasi.

Gambar 1.2 Layanan Dalam Aplikasi Identitas Kependudukan Digital



Sumber : Aplikasi Identitas Kependudukan Digital

Identitas Kependudukan Digital (IKD) telah diterapkan di berbagai daerah. Pada bulan juli tahun 2022, uji coba dilakukan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia. Tujuan utama uji coba adalah untuk mengidentifikasi kelebihan, kekurangan, serta kendala teknis yang mungkin timbul dalam penerapan IKD. Hasil evaluasi dari uji coba ini menjadi dasar untuk perbaikan dan penyempurnaan sistem IKD sebelum diluncurkan secara luas. Kemudian aktivasi untuk umum dilakukan pada tahun 2023 secara bertahap. Untuk target Nasional, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri menargetkan pada tahun 2023 sebesar 25% dari total perekaman KTP-el. Target tersebut berlaku bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di 514 Kabupaten/Kota di Indonesia.

Tabel 1.1 Realisasi Identitas Kependudukan Digital Sulawesi Selatan 2024

No	Kabupaten/kota	Realisasi IKD	No	Kabupaten/kota	Realisasi IKD
1	Kep. Selayar	9.271	13	Wajo	25.344
2	Bulukumba	60.352	14	Sidrap	4.816
3	Bantaeng	19.344	15	Pinrang	13.304
4	Jeneponto	16.134	16	Enrekang	3.727
5	Takalar	9.060	17	Luwu	7.815
6	Gowa	36.295	18	Tana Toraja	7.577
7	Sinjai	18.555	19	Luwu Utara	21.534
8	Bone	45.991	20	Luwu Timur	20.465
9	Maros	8.995	21	Toraja Utara	12.002
10	Pangkep	27.945	22	Makassar	109.460
11	Barru	10.708	23	Parepare	26.894
12	Soppeng	28.384	24	Palopo	8.285

Sumber: Disdukcapil Sulsel (2024)

Salah satu daerah yang menerapkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) adalah Kabupaten Soppeng. Melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng (Dukcapil Kab.Soppeng), pengimplementasian Identitas Kependudukan Digital (IKD) dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan. Kehadiran Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan respon akan kebutuhan masyarakat akan layanan administrasi yang lebih efisien dan efektif. Sebelum adanya Identitas Kependudukan Digital (IKD), pembuatan KTP-el sering mengalami kendala seperti blangko yang sempat mengalami kelangkaan. Layanan IKD ini terintegrasi langsung dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Menurut DUKCAPIL 2024 Kabupaten Soppeng jumlah penduduknya mencapai 241.364 jiwa. Dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Realisasi Identitas Kependudukan Digital Kabupaten Soppeng

No	Wilayah	Jumlah Penduduk	Wajib Ktp	Target 25%	Realisasi	Sisa Target	%
	KAB. SOPPENG	241.364	189.392	47,348	28.384	18,964	14.99
1	MARIORIWAWO	49.532	38.917	9,729	5.958	3,771	15.31
2	LILIRIAJA	28.889	22.741	5,685	3.692	1,993	16.23
3	LILIRILAU	38.816	31.209	7,802	3.203	4,599	10.26
4	LALABATA	50.034	38.461	9,615	5.611	4,004	14.59
5	MARIORIAWA	29.466	22.820	5,705	4.462	1,243	19.55
6	DONRI-DONRI	24.551	19.285	4,821	3.268	1,553	16.95
7	GANRA	11.834	9.375	2,344	1.275	1,069	13.60
8	CITTA	8.242	6.584	1,646	915	731	13.90

Sumber: Dukcapil Kabupaten Soppeng (2024)

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kabupaten Soppeng, realisasi program Identitas Kependudukan Digital (IKD) baru mencapai 28.384 jiwa atau 14.99%. Sedangkan target nasional yang ditetapkan 2023 yaitu sebesar 25% dari jumlah wajib KTP-el. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Program identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Soppeng belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Sehingga kondisi ini menunjukkan bahwa dalam penerapan program ini masih ada tantangan dalam pelaksanaannya.

Ketidaksesuaian antara target dan realisasi program IKD ini perlu untuk diteliti, mengingat pemerintah tengah berupaya mencapai keterpaduan layanan digital nasional dengan melakukan percepatan transformasi digital, melalui penyelenggaraan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Menurut Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, layanan administrasi kependudukan yang terintegrasi dengan Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan salah satu aplikasi prioritas yang diterapkan.

Lebih lanjut, penulis melakukan tinjauan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang dianggap relevan dan dapat berfungsi sebagai perbandingan untuk mendukung analisis penelitian ini. Tinjauan ini bertujuan untuk memberikan konteks yang lebih luas mengenai efektivitas program yang sedang diteliti, serta untuk mengidentifikasi temuan-temuan kunci yang dapat memperkaya pemahaman tentang isu yang diangkat. Adapun penelitian terdahulu terkait efektivitas program diuraikan sebagai berikut.

Tabel 1.3 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian
1.	Hardito Bastian Munthe (2024) "Efektivitas Penerapan Identitas Kependudukan Digital Dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo"	Penerapan IKD dalam meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan sejauh ini belum berjalan dengan efektif dimana hasil dari instrumen penelitian secara keseluruhan penerapan IKD belum menunjukkan hasil yang efektif seperti target yang belum tercapai, belum adanya integrasi dan adaptasi dengan masyarakat yang belum maksimal. Terdapat beberapa faktor penghambat seperti belum ada kerjasama IKD dari berbagai institusi seperti bank,	Penelitian ini memiliki persamaan yaitu mengkaji efektivitas Program IKD menggunakan Teori Efektivitas oleh Duncan dalam Steers 1985 dengan tiga indikator yaitu pencapaian tujuan, adaptasi dan integrasi. Penelitian ini juga sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun perbedaannya yaitu lokus penelitian di DUKCAPIL Kabupaten Karo, sedangkan penelitian ini lokusnya

		BPJS dan kurangnya literasi digital. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut mencakup sosialisasi integrasi IKD dengan bank dan BPJS, serta edukasi digital di tingkat kecamatan dan kelurahan maupun desa	di DUKCAPIL Kabupaten Soppeng.
2.	Rury Fathul Bary (2024) Efektivitas Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Aktivasi Identitas Kependudukan Digital Di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten	Penerapan IKD pada DUKCAPIL Kabupaten Tangerang mengalami kendala. Permasalahan pada aktivasi Identitas Kependudukan digital yaitu kurangnya jumlah pegawai pada bagian aktivasi IKD dan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai IKD. DUKCAPIL melakukan upaya dengan menambah jumlah pegawai pada bagian aktivasi IKD dan melakukan sosialisasi mengenai IKD agar dinas kependudukan dan pencatatan sipil efektif dalam melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digit	Penelitian ini memiliki persamaan yaitu mengkaji efektivitas Program dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun perbedaannya yaitu teori yang digunakan adalah teori efektivitas menurut Saxena dalam (Indrawijaya, 2010) dengan merujuk pada tiga dimensi efektivitas yaitu , dimensi kualitas, dimensi kauntitas, dimensi waktu. Sedangkan penelitian ini menggunakan Teori Efektivitas oleh Duncan dalam Steers 1985 dengan tiga indikator yaitu pencapaian tujuan, adaptasi dan integrasi. Lokus penelitian di DUKCAPIL Kabupaten Tangerang sedangkan penelitian ini lokusnya di DUKCAPIL Kabupaten Soppeng
3.	Reiva Amory Christy dan Prasetyo Isbandono (2024) Efektivitas Pelayanan Pembuatan KTP	Hasil menunjukkan bahwa melalui pengukuran efektivitas menurut Duncan yaitu: Mencapai tujuan, Integrasi, dan Adaptasi. Hasil dari pencapaian	Penelitian ini memiliki persamaan yaitu mengkaji efektivitas Program IKD menggunakan Teori Efektivitas oleh Duncan dalam Steers

	Digital Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya	tujuan membantu memudahkan masyarakat dalam pembuatan KTP Digital, integrasi mengadakan sosialisasi untuk masyarakat yang belum paham akan KTP Digital, dan adaptasi membantu masyarakat yang mengalami kesulitan saat aktivasi IKD. Faktor pendukung saat ini Dispendukcapil telah melakukan pemerataan sosialisasi ke beberapa kecamatan. Adapun faktor penghambatnya yaitu masih kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat dalam pembuatan KTP Digital.	1985 dengan tiga indikator yaitu pencapaian tujuan, adaptasi dan integrasi. Penelitian ini juga sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan terletak pada lokus penelitian yaitu di DUKCAPIL Kota Surabaya, sedangkan penelitian ini lokusnya di DUKCAPIL Kabupaten Soppeng.
--	--	--	--

Dari penelitian terdahulu dalam tabel tiga, menunjukkan bahwa ada penyebab berjalan dengan baik atau tidaknya efektivitas Program Identitas Kependudukan Digital (IKD). Penelitian ini tentunya memiliki kaitan dan perbedaan mengenai Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) dari penelitian sebelumnya. Dalam ketiga penelitian terdahulu tersebut, terdapat keterkaitan dengan penelitian ini memiliki yaitu berfokus pada efektivitas penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Namun, terdapat juga perbedaan pada teori yang digunakan yaitu penelitian kedua menggunakan teori efektivitas menurut Saxena dalam (Indrawijaya, 2010). Sedangkan penelitian pertama dan ketiga menggunakan teori Duncan dalam Steers (1985). Sejalan dengan penelitian sebelumnya, penulis juga menggunakan teori Efektivitas menurut Duncan dalam Steers (1985) dengan tiga indikator yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dengan menawarkan perspektif baru tentang pentingnya program identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam upaya mewujudkan kualitas pelayanan yang efektif. Sehingga rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah Mengapa Efektivitas Program Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng Belum Tercapai?

1.2 Tinjauan Teori

Teori yang dikemukakan oleh para ahli mengenai efektivitas memberikan kerangka kerja untuk memahami suatu organisasi, program, atau kebijakan dalam mencapai tujuannya secara optimal. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program.

Pathony dkk., 2020) juga menjelaskan bahwa efektivitas selalu terkait dengan kesesuaian antara hasil yang diharapkan dan hasil yang telah dicapai. Sebuah kegiatan dianggap efektif jika mampu memberikan dampak signifikan terhadap kemampuan penyediaan layanan kepada masyarakat, sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Efektivitas mengacu pada tingkat keberhasilan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Syam (2020) dalam jurnalnya mengemukakan efektivitas adalah seberapa besar tingkat output (keluaran) yang dicapai dengan output yang diharapkan dari jumlah input dalam suatu perusahaan. Pendapat lain oleh Siagian (2016) , efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan jumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Menurut Priansa dkk (2013), efektivitas adalah sejauh mana organisasi dalam mencapai tujuannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

Konsep efektivitas yang dikemukakan oleh para ahli organisasi dan manajemen memiliki makna yang berbeda, tergantung pada kerangka acuan yang dipergunakan. Berdasarkan beberapa pendapat di atas efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya dan mempunyai pengaruh besar. Efektivitas memerlukan perbandingan antara masukan dan keluaran, serta tingkat kepuasan yang tinggi dan terciptanya hubungan kerja yang kondusif. Dengan demikian, efektivitas harus diukur melalui proses yang baik dan hasil yang memadai, baik oleh individu, kelompok, maupun organisasi. Efektivitas pada umumnya di pandang sebagai tingkat pencapaian tujuan opratif dan operasional. Dengan demikian pada dasarnya efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan atau sasaran organisional sesuai yang ditetapkan.

Untuk menilai apakah sebuah organisasi itu efektif atau tidak, terdapat banyak cara atau pendapat, mengukur efektivitas menurut Campbell (1989) yaitu pengukuran efektivitas secara umum dapat dilakukan dengan menggunakan variabel sebagai berikut :

1. Keberhasilan program
Efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Keberhasilan sasaran
Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan dengan memusatkan perhatian terhadap aspek output, artinya efektivitas dapat diukur dengan seberapa jauh tingkat output dalam kebijakan dan prosedur dari organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
3. Kepuasan terhadap program
Kepuasan merupakan kriteria efektivitas yang mengacu pada keberhasilan program dalam memenuhi kebutuhan pengguna. Kepuasan dirasakan oleh para pengguna terhadap kualitas produk atau jasa yang dihasilkan. Semakin berkualitas produk dan jasa yang diberikan maka kepuasan yang dirasakan oleh pengguna semakin tinggi, maka dapat menimbulkan keuntungan bagi lembaga.

4. Tingkat input dan output
Pada efektivitas tingkat input dan output dapat dilihat dari perbandingan antara masukan (input) dengan keluaran (output). Jika output lebih besar dari input maka dapat dikatakan efisien dan sebaliknya jika input lebih besar dari output maka dapat dikatakan tidak efisien.
5. Pencapaian tujuan menyeluruh
Sejauhmana organisasi melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini merupakan penilaian umum dengan sebanyak mungkin kriteria tunggal dan menghasilkan penilaian umum efektivitas organisasi.

Mengukur efektivitas organisasi menurut S.P Siagian dalam (Suryani, 2016) mengemukakan bahwa efektivitas organisasi dapat diukur dari delapan indikator yaitu:

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai supaya karyawan dalam pelaksanaan tugasnya mencapai sasaran dan tujuan nya.
2. Kejelasan Strategi pencapaian tujuan, strategi ini adalah cara dalam upaya pencapaian suatu sasaran.
3. Proses Analisa dan perumusan kebijaksanaan yang berkaitan dengan tujuan yang ingin di capai dan strategi yang akan digunakan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan dengan usaha kegiatan operasional.
4. Perencanaan yang matang pada hakikatnya memutuskan sekarang apa yang dikerjakan dimasa mendatang.
5. Penyusunan program yang tepat , apabila pelaksanaan kurang memiliki pedoman bertindak dalam bekerja itu di sebabkan tidak di jabarkannya rencana pada program pelaksanaan yang tepat.
6. Kemampuan kerja secara produktif dengan sarana dan prasarana yang tersedia.
7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimana suatu program bila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka suatu organisasi tersebut tidak akan mencapai keberhasilan sesuai dengan sasaran.
8. Sistem pengawasan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas menuntut adanya sistem pengawasan dan pengendalian.

Mengukur efektivitas suatu program bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang. Efektivitas program adalah suatu penilaian atau pengukuran terhadap sejauh mana kegiatan dalam program-program yang telah dilakukan dapat mencapai tujuan awal dari program tersebut. Keberhasilan suatu program dapat dilihat pada efektivitas pencapaian tujuan yang telah direncanakan sebelumnya oleh organisasi terkait. Menurut Makmur (2011) Efektivitas Program adalah kegiatan yang pelaksanaannya menampakkan ketepatan antara harapan yang kita inginkan dengan hasil yang dicapai, dimana ditunjukkan dengan ketepatan harapan, implementasi, dan hasil yang dicapai.

Martini & Lubis dalam (Masruri 2017) menjelaskan untuk mengukur efektivitas program dengan tiga pendekatan antara lain:

1. Pendekatan Sumber (*resource approach*) yaitu mengukur seberapa efektif masukan (input). Pendekatan ini mengutamakan keberhasilan organisasi

untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhannya.

2. Pendekatan Proses (*process approach*) yaitu untuk mengetahui sejauh mana efektivitas program diterapkan melalui proses internal atau mekanisme organisasi.
3. Pendekatan Sasaran (*goals approach*) yaitu berpusat pada *output* atau hasil dimana mengukur keberhasilan organisasi mencapai hasil sesuai tujuan.

Penilaian efektivitas suatu program perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana dampak atau manfaat yang dihasilkan dari pelaksanaan program tersebut. Melalui pengukuran efektivitas, dapat diperoleh gambaran yang jelas yang kemudian bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk evaluasi dan pengambilan keputusan terkait kelanjutan atau perbaikan program tersebut.

Menurut Budiani (2007) dalam mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel seperti dibawah ini :

1. Ketepatan Sasaran Program merupakan tingkat keberhasilan suatu program sesuai dengan sasaran yang ditentukan.
2. Sosialisasi Program merupakan kemampuan penyelenggara dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat.
3. Tujuan Program merupakan kesesuaian antara hasil dengan tujuan program yang telah ditetapkan.
4. Pemantauan Program merupakan pemantauan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

Untuk mengukur efektivitas program menurut sutrisno (2018) menidentifikasi hasil studi para ahli mengenai ukuran efektivitas program didalam sebuah organisasi, yaitu:

1. Pemahaman program yaitu sejauhmana masyarakat dapat memahami kegiatan program
2. Tepat Sasaran dapat dilihat dari tercapai apa yang atau menjadi kenyataan
3. Tepat Waktu artinya sejauhmana program bisa mempengaruhi penggunaan waktu dalam pelaksanaan pelayanan
4. Tercapainya Tujuan dapat diukur dengan melalui pencapaian tujuan program yang telah dijalankan
5. Perubahan Nyata dapat diukur dengan melalui sejauhmana program tersebut mampu memberikan suatu efek atau dampak serta perubahan nyata bagi masyarakat.

Pengukuran efektivitas yang dikemukakan oleh Duncan dalam (Steers, 1985) mengemukakan bahwa ukuran efektivitas dalam pengukuran efektivitas program menggunakan 3 indikator yaitu :

1. Pencapaian Tujuan

Dalam pencapaian tujuan, seluruh usaha dalam pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar proses pencapaian tujuan akhir lebih baik dan terjamin, dibutuhkan sebuah tahapan dalam proses pencapaian. Baik dalam tahapan pencapaian bagian-bagiannya juga tahapan dalam arti periodisasinya.

2. Adaptasi

Adaptasi merupakan kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan segala sesuatu yang berubah di lingkungan sekitar. Implementasi program yang dilaksanakan harus menyesuaikan dengan keadaan di lapangan.

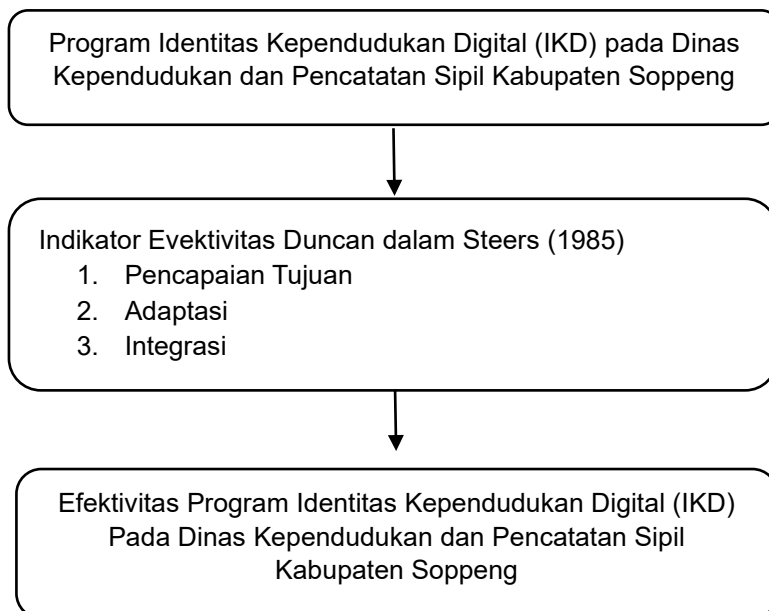
3. Integrasi

Integrasi merupakan pengukuran atau penilaian terhadap tingkat kemampuan organisasi untuk melakukan program. Kegiatan dalam mendukung program menyangkut dengan bagaimana proses sosialisasi di lapangan. Indikator dalam integrasi yaitu prosedur kegiatan dan proses sosialisasi.

Teori yang kemudian digunakan pada penelitian ini adalah teori efektivitas yang dikemukakan oleh Duncan dalam Steers (1985). Penggunaan teori ini dipilih karena teori Duncan dinilai relevan terhadap masalah yang diangkat dalam penelitian. Dalam teori ini, Duncan menjelaskan bahwa terdapat tiga indikator utama yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas program, yaitu pencapaian tujuan, adaptasi, dan integrasi. Teori ini menilai efektivitas program tidak hanya dari hasil akhir, tetapi juga melalui pencapaian tujuan secara sistematis, adaptasi terhadap lingkungan, dan keselarasan internal.

Berikut gambaran kerangka berpikir yang digunakan oleh penulis pada penelitian yang berjudul “Efektivitas Program Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng”

Gambar 1.3 Kerangka Berpikir



I.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

I.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng yang belum tercapai.

I.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dengan memberikan kontribusi pada pengembangan literatur administrasi publik mengenai efektivitas program. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi media untuk mengaplikasikan berbagai teori mengenai efektivitas suatu program. Penelitian ini mampu memperkaya data dan informasi serta menjadi teori-teori yang sesuai dengan bidang ilmu pengetahuan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan peningkatan Efektivitas Program Identitas Kependudukan Digital.

2. Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan wawasan bagi peneliti dalam mengaplikasikan ilmu yang diperoleh serta diimplementasikan di lapangan. Penelitian ini juga memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang memiliki terlibat di dalam implementasi program. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan bahan evaluasi bagi para pelaksana program dalam meningkatkan kualitas layanan program-program secara lebih baik.

BAB II METODE PENELITIAN

II.1 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut John W. Creswell & J. David Creswell (2018) dalam bukunya, penelitian kualitatif merupakan suatu metode mendeskripsikan, mengeksplorasi dan memahami pada makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Penelitian kualitatif mengkaji data yang lebih mendalam dan merinci untuk memahami fokus permasalahan penelitian ini. Dengan metode ini memungkinkan peneliti untuk mendapat pemahaman yang kaya serta informasi dari fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

Pendekatan kualitatif dipilih pada penelitian ini untuk mengungkapkan suatu fenomena secara komprehensif dan mendalam, dengan mengumpulkan data sebanyak mungkin dan mendeskripsikannya dengan jelas. Pendekatan penelitian ini juga dianggap tepat untuk menjelaskan bagaimana Efektivitas Program Identitas Kependudukan Digital Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng. Menurut John W. Creswell (2018), dalam proses penelitian kualitatif melibatkan proses penting, yaitu mengajukan pertanyaan dan prosedur, pengumpulan data secara spesifik, menganalisis data, serta menafsirkan makna data. Dengan menggunakan pendekatan ini, diharapkan dapat mempermudah peneliti dalam memperoleh informasi dan data yang relevan untuk menjawab pertanyaan yang mendasar terkait penelitian ini.

II.2 Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti fokus pada Efektivitas Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) dengan menggunakan teori efektivitas menurut Duncan dalam Steers (1985). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tiga indikator yaitu:

1. Pencapaian Tujuan

Indikator ini melihat sejauh mana Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun aspek yang digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan ini meliputi:

- a. Peningkatan Efisiensi: Menilai sejauh mana program IKD meningkatkan ketepatan, kecepatan, dan keterjangkauan layanan administrasi kependudukan.
- b. Kemudahan Akses: Menganalisis seberapa mudah masyarakat dapat mengakses layanan IKD melalui aplikasi yang disediakan.
- c. Pengurangan Dokumen Fisik: Menilai keberhasilan IKD dalam mengurangi ketergantungan terhadap dokumen fisik dalam berbagai pelayanan administratif.

2. Adaptasi

Indikator ini melihat sejauhmana kemampuan organisasi dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) melakukan penyesuaian dengan perubahan lingkungan sosial, lingkungan teknologi dan lingkungan ekonomi. Untuk mengetahui bagaimana proses adaptasi DUKCAPIL terhadap kehadiran IKD, terdapat aspek yang diperhatikan meliputi :

- a. Adaptasi teknologi : Analisis mengenai sejauh mana Dukcapil mampu mengadopsi teknologi baru dalam implementasi IKD.
 - b. Kebutuhan Masyarakat yang Dinamis dan pemahaman konteks lokal: Mengkaji apakah masyarakat benar-benar membutuhkan IKD dan sejauh mana mereka memanfaatkannya serta kesesuaian program dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat di daerah setempat.
 - c. Perubahan Regulasi: Kemampuan Dukcapil dalam menyesuaikan kebijakan dan regulasi IKD.
3. Integrasi
- Integrasi menyangkut prosedur pelaksanaan dan proses sosialisasi. Indikator ini mengukur sejauh mana Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) dapat terintegrasi dan dapat diterima oleh masyarakat. Terdapat indikator untuk mengetahui bagaimana proses integrasi, yaitu:
- a. Koordinasi Antar Bagian: Menilai bagaimana koordinasi antar bagian di DUKCAPIL dalam mengelola dan menjalankan program IKD.
 - b. Kemampuan Petugas dalam Mengoperasikan Aplikasi: Mengukur kesiapan dan kemudahan petugas dalam menggunakan aplikasi IKD serta dalam menangani kendala teknis..
 - c. Sosialisasi kepada Masyarakat: Menilai efektivitas sosialisasi program kepada masyarakat untuk memastikan pemahaman yang lebih baik terhadap konteks lokal dan manfaat program ini.

II.3 Desain Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, John W. Creswell (2015) menjelaskan lima bentuk desain penelitian, antara lain etnografi, grounded teori, studi kasus, fenomenologi, dan biografi. Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kasus. Menurut Creswell (2018), studi kasus merupakan desain penelitian yang mengkaji lebih mendalam tentang sebuah program, kejadian, aktivitas, proses atau satu atau lebih individu. Studi kasus menjadi metode yang tepat untuk menjawab pertanyaan “*how*” atau “*why*”. Desain studi ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan informasi yang rinci mengenai penerapan program yang diteliti. Desain studi kasus ini dianggap tepat untuk menganalisis tingkat efektivitas Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) Pada DUKCAPIL Kabupaten Soppeng.

II.4 Prosedur Penelitian

II.4.1 Penentuan Informan

Informan dalam penelitian ini merupakan individu yang dapat memberikan informasi, data, dan fakta mengenai fenomena atau permasalahan dalam penelitian. Dengan demikian melalui informan ini peneliti dapat memperoleh informasi yang kaya dan pengetahuan yang mendalam mengenai fenomena dalam penelitian ini. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu :

1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng
2. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
3. Staf Bidang PIAK dan Pemanfaatan data
4. Pengguna Layanan Identitas Kependudukan Digital

II.4.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpuln data menurut Creswell (2018) mencakup beberapa metode utama yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang mendalam dan komprehensif. Pengumpulan data sebagai usaha membatasi penelitian dan mengumpulkan informasi melalui beberapa metode. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam peneltian ini yaitu:

1. Observasi

Observasi menurut Creswell (2018) adalah teknik pengumpulan data yang yang dilakukan dengan mengamati perilaku dan aktivitas individu secara langsung. Observasi ini dilakukan melalui pengamatan secara terbuka serta melakukan pencatatan tentang aktivitas individu dilapangan. Dalam penelitian ini, peneliti dapat melakukan observasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Melakukan observasi secara langsung untuk mengamati dan mendapatkan fakta-fakta mengenai pelaksanaan program Identitas Kependudukan Digital.

2. Wawancara

Wawancara menurut Creswell (2018) adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melibatkan dua pihak yaitu peneliti dengan informan. Wawancara dapat dilakukan dengan berhubungan langsung dengan informan seperti wawancara tatap muka, melalui telepon, ataupun dengan terlibat dalam *focus group interview* untuk memperoleh pandangan dan pendapat dari informan. Wawancara memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan informasi yang dapat menjawab pertanyaan eneliti mengenai Efektivitas Program Identitas Kependudukan Digital. Dengan demikian, peneliti dapat memperoleh informasi lebih mendalam dan memahami tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan program.

3. Dokumentasi

Telaah dokumen menurut Creswell (2018) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen, baik dokumen publik maupun dokumen pribadi. Dokumen ini diperlukan sebagai bahan data informasi yang memiliki keterkaitan dengan masalah penelitian. Dokumen dalam penelitian ini mencakup dokumen yang berkaitan dengan informasi pengguna dalam program Identitas Kependudukan Digital. Dokumentasi ini digunakan untuk mendukung dan melengkapi informasi yang diperoleh dari observasi dan wawancara.

II.4.3 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan setelah pengumpulan data selesai. Analisis data menurut Sugiyono (2014), merupakan menyusun data yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif yaitu analisis yang diperoleh kemudian dikembangkan menjadi hipotesis. Dalam penelitian ini mengacu pada pandangan Milles, Huberman, & Saldana (2014), analisis data kualitatif dibagi kedalam tiga langkah, yaitu data condensation (kondensasi data), data display (menyajikan data), dan conclusion drawing and verification (menarik simpulan atau verifikasi)

1. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Menurut Milles, Huberman, & Saldana (2014), kondensasi data merupakan proses memilih, memfokuskan, menuederhanakan, mengabstraksi, dan mentransformasi data secara keseluruhan dari catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen, dan data temuan lainnya. Data yang diperoleh dilapangan berjumlah cukup banyak, kompleks dan rumit, oleh karena itu perlu sebuah kondensasi data. Kondensasi bertujuan untuk membuat data penelitian menjadi lebih kuat dengan mempertajam, memilah, memfokuskan, menghilangkan, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga dapat menarik kesimpulan.

2. Penyajian Data (*Display Data*)

Penyajian data merupakan kumpulan data atau informasi terorganisir yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Tahap ini menyajikan data yang berbentuk teks naratif hasil penelitian. Penyajian data yang baik dapat memberikan analisis kualitatif yang kuat. Penyajian data selain berbentuk uraian singkat dapat berupa, matriks, grafik, bagan, dan lain sejenisnya. Penyajian data ini bertujuan untuk mengorganisasi informasi secara ringkas sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai hasil penelitian yang memudahkan peneliti dalam memahami permasalahan dan menarik kesimpulan atau beralih ke langkah analisis berikutnya.

3. Penarikan dan Verifikasi Kesimpulan (*Drawing and Verifying Conclusion*)

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif menurut Miles & Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dari awal pengumpulan data, analisis kualitatif menginterpretasikan makna dari informasi yang ada. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengidentifikasi pola atau temuan yang muncul selama pengumpulan data. Namun, dalam penarikan kesimpulan juga harus dilakukan verifikasi untuk memastikan kebenarannya. Verifikasi dapat berupa pemikiran ulang singkat selama penulisan, pengecekan ulang pada catatan lapangan, atau pengkajian yang lebih mendalam. Dengan demikian, penarikan dan verifikasi kesimpulan dalam penelitian dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal.

II.4.4 Validitas dan Realibilitas Data

1. Validitas Data

Konsep validitas dalam penelitian kualitatif mengacu pada pembuktian hasil penelitian bahwa data yang diperoleh benar-benar mencerminkan realitas dilapangan. Creswell (2018) menjelaskan bahwa validitas kualitatif bertujuan untuk memeriksa keakuratan temuan dalam penelitian ini dengan menggunakan beberapa metode. Menurut Creswell & Miller dalam Creswell (2018) validitas merupakan salah satu kekuatan penelitian kualitatif yang didasarkan pada tingkat akurat hasil penelitian dari sudut pandang peneliti, partisipan ataupun pembaca.

Menurut Creswell (2018) terdapat delapan strategi validitas yang dapat digunakan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber data untuk menguji keabsahan data. Triangulasi sumber data

dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dan membangun argumen yang logis. Triangulasi sumber data ini untuk memastikan kredibilitas data, wawancara, observasi, dokumen selama penelitian.

2. Reliabilitas Data

Reliabilitas data kualitatif mengacu pada konsistensi dan ketepatan data yang diperoleh dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, reliabilitas dapat dicapai dengan pengumpulan data yang lengkap, mengorganisasi data dengan rinci, serta menelaah data. Sugiyono (2014) menjelaskan bahwa reliabilitas merupakan pengukuran dari instrumen atau alat ukur yang memiliki konsistensi hasil relatif dan tidak berubah meskipun dilakukan secara berulang pada situasi yang berbeda. Uji reliabilitas disusun dengan jelas, rinci, dan sistematis dan terpercaya sehingga pembaca akan memahami secara jelas hasil dari penelitian dalam hal ini hasil penelitian terkait Efektivitas Program Identitas Kependudukan Digital Pada DUKCAPIL Kabupaten Soppeng.